Jurnal Penyuluhan Pertanian

Journal homepage: https://jurnal.polbangtan-bogor.ac.id/index.php/jpp

Membedah Ketimpangan *Gender*: Responsivitas Kebijakan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Bogor

Unveiling Gender Disparities: Responsiveness of Agricultural Extension Policy in Bogor Regency

Anna Fatchiya[1], Dyah Retna Puspita[1*], Adi Firmansyah[2], Hana Indriana[1], Titania Aulia[1], Siti Syamsiah[3], Rafnel Azhari[4]

[1]IPB University, Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia, 16128
[2]IPB University, Pusat Kajian Resolusi Konflik, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia, 16128
[3]Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia, 16119
[4]Universitas Andalas, Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Padang, Sumatera Barat, Indonesia, 251126
[*]Email korespondensi: dyahretna@apps.ipb.ac.id

Informasi Artikel

Diterima 27 Januari 2025
Direvisi 6 Mei 2025
Diterima 27 Mei 2025
Diterbitkan online 13 Juni 2025

Keywords

Gender equality, gender responsiveness, inclusive agricultural extension, sustainable development

Abstract

Gender equality in the agricultural sector is key to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). This study aims to analyze the gender responsiveness of agricultural extension policies in Bogor Regency and evaluate differences in perceptions between male and female extension agents regarding these policies. The research employs a descriptive quantitative method involving 60 agricultural extension agents selected through purposive sampling, considering diversity based on gender and extension status. Data were collected through questionnaires and analyzed using descriptive analysis and t-tests. The results indicate that gender responsiveness in agricultural extension policies remains suboptimal, with gaps in transportation provision, operational costs, access to training, and advanced education. Female extension agents tend to face more challenges than their male counterparts. This is compounded by the limited support for involving female extension agents in extension activities and the mandatory requirement for gender-disaggregated data collection. Statistical tests reveal significant differences in gender perceptions among extension agents regarding several indicators, such as the ease of access to training and advanced education. Based on these findings, it is recommended that extension policies be more responsive to the specific needs of female extension agents by developing inclusive extension materials, providing gender-friendly transportation facilities, and strengthening gender-based training and education. These measures are crucial to promoting equality and sustainability in agricultural development.

Kata Kunci

kesetaraan *gender*, penyuluhan pertanian inklusif, pembangunan berkelanjutan, responsivitas *gender*

Abstrak

Kesetaraan *gender* pada sektor pertanian merupakan salah satu elemen kunci dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis responsivitas *gender* kebijakan penyuluhan pertanian di Kabupaten Bogor serta mengevaluasi perbedaan persepsi penyuluh laki-laki dan perempuan terhadap kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan melibatkan 60 penyuluh pertanian yang dipilih melalui purposive sampling dengan mempertimbangkan keragaman berdasarkan *gender* dan status penyuluh. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif serta uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsivitas *gender* dalam kebijakan penyuluhan pertanian masih belum optimal, dengan kesenjangan terlihat pada aspek penyediaan transportasi, biaya operasional, akses pelatihan dan pendidikan lanjutan. Penyuluh perempuan cenderung menghadapi lebih banyak kendala dibandingkan penyuluh laki-laki. Hal ini diperkuat dengan masih rendahnya dukungan untuk melibatkan penyuluh perempuan dalam kegiatan penyuluhan dan kewajiban untuk selalu membuat data terpilah *gender*. Uji statistik mengungkapkan adanya perbedaan signifikan dalam persepsi *gender* penyuluh terkait beberapa indikator, seperti kemudahan pelatihan dan pendidikan lanjutan. Dari hasil ini disarankan agar kebijakan penyuluhan perlu lebih responsif terhadap kebutuhan spesifik penyuluh perempuan melalui pengembangan materi penyuluhan yang inklusif, penyediaan fasilitas transportasi ramah *gender*, serta penguatan pelatihan dan pendidikan berbasis *gender* untuk mendukung kesetaraan dan keberlanjutan dalam pembangunan pertanian.

E-ISSN: 1907-5893
P-ISSN: 2599-0403
DOI: 10.51852/157rfh57
© 2025 Jurnal Penyuluhan Pertanian. All right reserved
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

1. Pendahuluan

Kesetaraan *gender* dan hak-hak perempuan merupakan salah satu komponen penting dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama pada tujuan ke-5 (Kesetaraan *Gender*) dan tujuan ke-8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) khususnya yang terkait dengan upah. SDGs mendorong setiap negara untuk memberikan akses yang adil bagi laki-laki dan perempuan dalam peluang ekonomi, termasuk dalam bidang pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi banyak negara berkembang. Kesetaraan *gender* diartikan sebagai kondisi tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai indikator hak sosial dan budaya. PBB menekankan bahwa meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia usaha dan pekerjaan dapat mengurangi kesenjangan *gender* di bidang ekonomi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (World Bank, 2020).

Salah satu upaya mewujudkan kesetaraan *gender* adalah melalui kebijakan dan program yang responsif *gender*. Responsif *gender* adalah perhatian secara konsisten dan sistematis untuk merespons kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan *Gender* (Paralegal.id, 2023). Di Indonesia, komitmen ini telah diterapkan sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan *Gender* (PUG) dalam Pembangunan Nasional dan hingga saat ini masih menjadi panduan kerja Pemerintah. Dikaitkan dengan komitmen untuk menerapkan SDG's, maka salah satu aspek yang perlu dikaji dalam pembangunan pertanian adalah sejauh mana kebijakan penyuluhan telah responsif *gender*.

Kajian tentang responsivitas *gender* kebijakan penyuluhan telah cukup banyak dilakukan. Dengan menggunakan responden dari kalangan petani, kebanyakan hasil penelitian tersebut menyebutkan masih adanya ketidakadilan *gender* atau diskriminasi *gender* terhadap petani perempuan (Lahai *et al*., 1999). Demikian halnya dengan beberapa kajian dengan kasus di Indonesia (Ali *et al.*, 2018; Ardita *et al*., 2017; Ikonny, 2017; Indraningsih, 2016; Khairunnisa *et al*., 2021; Krisnawati *et al*., 2013).

Adapun kajian yang menggunakan perspektif penyuluh sebagai sumber datanya relatif masih terbatas (Hayati *et al*., 2024, Puspita *et.al.*, 2018). Padahal, penyuluh pertanianlah yang menjadi ujung tombak kegiatan penyuluhan, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pendampingan bagi petani dalam pengadopsi teknologi baru, mengakses pasar dan sebagainya. Mereka juga berperan penting dalam ketahanan pangan yakni sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dengan petani. Atas dasar ini, maka persepsi mereka tentang sejauh mana kebijakan penyuluhan sudah responsif *gender*, perlu diperhatikan. Melalui kajian ini akan dapat direkomendasikan usulan maupun revisi kebijakan yang lebih tepat sasaran, tidak saja bagi petani laki-laki dan perempuan, melainkan juga bagi penyuluh laki-laki dan perempuan.

Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah pertanian di Provinsi Jawa Barat. Menurut data Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Bogor, luas lahan sawah di Kabupaten Bogor adalah 36.355,2 ha di mana sebagian besarnya (74,72 % atau 27.163,0 ha) merupakan pengairan irigasi dan sisanya (9.192,2 ha) adalah pengairan tadah hujan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2019). Sebagian besar rumah tangga usaha pertanian di kabupaten ini (69,97 % atau 132.927 rumah tangga) hanya memiliki luas lahan di bawah 1 ha dan bahkan mayoritasnya (43,73 %) hanya memiliki luas lahan kurang dari 0,1 hektar (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2023).

Kabupaten Bogor terdiri dari 40 kecamatan dan 435 desa. Kabupaten ini memiliki 12 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan 327 tenaga penyuluh pertanian. Dari sejumlah 327 tenaga penyuluh tersebut, sebagian besar (218 orang atau 66, 67 %) adalah penyuluh swadaya, disusul dengan penyuluh PNS (66 orang atau 20,18 %) dan tenaga P3K (43 orang

atau 13,15 %). Adapun presentasi penyuluh berdasarkan jenis kelamin adalah 53,33 % laki-laki dan sisanya 46,67 % perempuan (BPPSDMP Kementan, 2023).

Luasnya wilayah pertanian di Kabupaten Bogor tersebut serta masih terbatasnya jumlah penyuluh, maka menjadi perlu dan penting dikaji bagaimana responsivitas *gender* kebijakan penyuluhannya, khususnya pada program YESS, perluasan areal tanam (PAT) dan program rutin penyuluhan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji: (1) seberapa tinggi responsivitas *gender* kebijakan penyuluhan pertanian, dan (2) ada tidaknya perbedaan *gender* penyuluh tentang responsivitas *gender* kebijakan penyuluhan pertanian di Kabupaten Bogor. Kajian ini diharapkan dapat digunakan untuk merancang model kebijakan penyuluhan pertanian yang responsif *gender*, yang tidak saja sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan para petani laki-laki dan perempuan, melainkan juga para penyuluh laki-laki dan perempuan. Model ini mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat penyuluhan dari sisi *gender*.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Populasi penelitiannya merupakan semua penyuluh pertanian di Kabupaten Bogor yang berjumlah 327 orang. Dari jumlah tersebut, diambil sampel sebanyak 60 orang responden (18,35 %) yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keragaman berdasarkan *gender* dan status penyuluh. Sehingga diperoleh komposisi sebanyak 30 orang PNS, 18 orang P3K, dan 12 orang THL. Jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, yakni 32 orang (53,33 %), sedangkan jumlah penyuluh perempuan adalah 28 orang (46,67 %). Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan *google-form*, di mana kuesionernya terdiri dari dua bagian yakni Karakteristik Individu dan Responsivitas *Gender* dalam Kebijakan Penyuluhan Pertanian.

Karakteristik Individu adalah ciri-ciri responden yang dilihat dari jenis kelamin, umur dan masa kerja, status penyuluh, serta jumlah desa dan kelompok binaan. Pertanyaan menyangkut hal ini ada pertanyaan yang bersifat tertutup dan terbuka. Adapun untuk variabel Responsivitas Kebijakan Penyuluhan Pertanian dilihat dari sembilan indikator. Semua pertanyaan tentang variabel ini bersifat tertutup dengan menggunakan empat pilihan jawaban berjenjang yakni: sangat sesuai, kurang sesuai, tidak sesuai, sangat tidak sesuai. Selanjutnya, dilakukan transformasi data ordinal ke interval dengan Metode Suksesif Interval (MSI). MSI adalah metode transformasi data ordinal menjadi data interval. Data dikumpulkan selama dua minggu pada tanggal 18 - 29 November 2024. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan: (1) analisis deskriptif, yang digunakan untuk mendeskripsikan persepsi responden laki-laki dan perempuan terhadap responsivitas *gender* kebijakan penyuluhan pertanian yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, serta (2) uji inferensial menggunakan uji t, yang digunakan untuk mengkaji perbedaan *gender* dalam persepsi responden terhadap sembilan indikator yang dikaji.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Karakteristik Responden

Umur dan Masa Kerja

Responden penelitian ini berjumlah 60 orang penyuluh di mana hampir separuh dari mereka (46,67 % atau 28 orang) adalah perempuan. Rata-rata umur responden adalah 36,1 tahun di mana pada responden perempuan rata-ratanya adalah 36,4 tahun lebih tua dibandingkan laki-laki rata-ratanya adalah 35,9 tahun. Jika dilihat dari kategori umur, lebih banyak perempuan yang termasuk kategori di bawah 35,5 tahun. Pada umumnya responden

telah bekerja sebagai penyuluh selama 9,4 tahun, di mana masa kerja responden perempuan lebih lama dibandingkan laki-laki masing-masing selama 9,5 tahun berbanding 9,3 tahun. Dimilikinya pengalaman kerja yang sudah cukup lama ini berpeluang meningkatkan kompetensinya dalam membina hubungan dengan petani dan memahami dinamika lokal. Keadaan umur dan masa kerja responden ini ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1 Keadaan umur dan masa kerja responden berdasarkan jenis kelamin

Kategori Umur (Tahun)	Laki-Laki		Perempuan		Total	
	Jumlah (n)	Persentase (%)	Jumlah (n)	Persentase (%)	Jumlah (n)	Persentase (%)
< 31	12	20,00	5	8,33	17	28,33
31 - 35.5	5	8,34	8	13,33	13	21,67
35.5 - 39.25	8	13,33	7	11,67	15	25,00
> 39.25	7	11,67	8	13,33	15	25,00
Total	32	53,33	28	46,67	60	100
Rata-rata umur	35,9		36,4		36,1	
Rata-rata masa kerja	9,3		9,5		9,4	

Sumber: diolah dari data primer

Jumlah Desa dan Kelompok Binaan

Salah satu tugas penyuluh adalah melakukan pembinaan terhadap kelompok petani (poktan) yang ada di desa binaan mereka. Berdasarkan Tabel 2, rata-rata jumlah desa binaan responden secara keseluruhan adalah tiga desa, di mana responden perempuan memiliki rata-rata jumlah desa binaan yang lebih banyak (3,6 desa) dibandingkan laki-laki (2,6 desa). Adapun jumlah rata-rata kelompok tani binaan mereka adalah 13,0 kelompok di mana rata-rata jumlah poktan pada responden perempuan lebih sedikit (10,9 kelompok) dibandingkan laki-laki (14,9 kelompok).

Jika dilihat dari rata-rata jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang menjadi binaan mereka, responden perempuan memiliki jumlah Gapoktan yang lebih sedikit (1,7 kelompok) dibandingkan laki-laki (2,0 kelompok). Pada setiap Gapoktan yang dibina responden terdapat pengurus perempuan di mana persentase rata-rata perempuan yang menjadi pengurus di kalangan responden perempuan lebih sedikit (13,7 %) dibandingkan laki-laki (18,4 %). Adapun dilihat dari anggotanya, baik pada kelompok responden penyuluh laki-laki maupun perempuan, mayoritas dari mereka adalah laki-laki, terutama di kalangan responden penyuluh perempuan (83,4 %), sedangkan di kalangan responden laki-laki persentasenya sebesar 78,2 persen. Sementara itu, persentase anggota perempuan lebih banyak di kalangan responden penyuluh laki-laki (20,4 %) dibandingkan perempuan (16,8 %). Dilihat dari tingkat kepemilikan lahannya, separuh dari anggota kelompok (57,9 %) adalah petani kurang mampu/gurem. Ini terjadi baik di kalangan responden laki-laki maupun perempuan.

Di samping membina Gapoktan, responden juga membina Kelompok Wanita Tani (KWT). Untuk rata-rata jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) yang dibina responden perempuan jumlahnya lebih banyak (2,9 kelompok) dibandingkan laki-laki (1,9 kelompok). Kondisi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Rata-rata jumlah desa binaan dan kelompok tani binaan berdasarkan jenis kelamin

Variabel	Satuan	Penyuluh Laki-Laki (n=32)	Penyuluh Perempuan (n=28)	Total (n=60)
Rata-rata jumlah desa binaan	Desa	2,6	3,6	3,0
Rata-rata jumlah poktan binaan		14,9	10,9	13,0
Rata-rata jumlah gapoktan binaan	Kelompok	2,0	1,7	1,9
Persentase rata-rata perempuan sebagai pengurus pada poktan binaan	%	18,4	13,7	16,4
Persentase rata-rata petani perempuan pada setiap poktan binaan	%	24,0	16,8	20,7
Persentase rata-rata anggota kelompok binaan yang tergolong kurang mampu (petani gurem)	%	59,9	55,6	57,9
Rata-rata jumlah KWT binaan (KWT)	Kelompok	1,9	2,9	2,3

Sumber: diolah dari data primer

Berdasarkan uraian tentang karakteristik responden pada Tabel 2, terdapat temuan-temuan yang menarik. Penelitian ini mengungkapkan bahwa perempuan penyuluh memiliki rata-rata jumlah desa binaan yang lebih banyak dibandingkan laki-laki, tetapi jumlah poktan dan Gapoktan yang mereka bina lebih sedikit. Fenomena ini mencerminkan tantangan yang dihadapi penyuluh perempuan dalam mengelola beban kerja yang tersebar, yang berpotensi memengaruhi efektivitas pendampingan mereka. Sebagaimana diketahui, luas wilayah Kabupaten Bogor yakni 2.966,8 km^2 yang terdiri dari 416 Desa dan 19 Kelurahan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Gillett-Swan & Grant-Smith (2020) yang menunjukkan bahwa perempuan dalam peran pendampingan sering menghadapi tekanan kerja yang tinggi tanpa dukungan kelembagaan yang memadai. Standar pribadi yang tinggi dan beban kerja yang tidak terkompensasi dapat meningkatkan risiko kelelahan (*burnout*), yang selanjutnya berdampak negatif pada kapasitas mereka untuk memberikan pendampingan yang efektif.

Lebih lanjut, Hobson & Mullen (2023) menekankan pentingnya dukungan organisasi dalam membantu mentor mengelola beban kerja yang berat. Tanpa dukungan yang memadai, penyuluh perempuan cenderung mengalami kesulitan dalam memberikan pendampingan intensif kepada kelompok tani atau Gapoktan tertentu. Penelitian Blok *et al.*, (2022) juga menemukan bahwa beban kerja yang berat menjadi penghalang utama bagi keterlibatan mentor dalam inisiatif peningkatan kualitas. Dalam konteks ini, terbatasnya waktu dan energi penyuluh perempuan sering kali membatasi kapasitas mereka untuk mendalami hubungan mentoring dengan kelompok binaan, yang dapat mengurangi keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

Data juga menunjukkan bahwa penyuluh perempuan cenderung lebih terlibat dalam pembinaan KWT, menunjukkan peran strategis mereka sebagai penggerak pemberdayaan perempuan di tingkat komunitas. Keterlibatan ini relevan dengan pendekatan penyuluhan yang lebih responsif *gender*, terutama dalam mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan pertanian.

Data menunjukkan penyuluh perempuan memiliki fokus pada KWT, namun ternyata persentase perempuan sebagai pengurus kelompok tani masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, bahkan di kelompok yang dibina oleh penyuluh perempuan. Hal ini mengindikasikan adanya hambatan struktural yang membatasi peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam posisi kepemimpinan. Di sisi lain, mayoritas anggota kelompok tani binaan masih didominasi oleh laki-laki, mencerminkan tantangan bagi penyuluhan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat kelompok tani.

Hal yang menarik lainnya ternyata rata-rata masa kerja penyuluh perempuan yang lebih panjang dibandingkan laki-laki. Hal ini dapat menjadi keunggulan dalam penyuluhan responsif *gender*. Pengalaman kerja yang lebih lama ini memungkinkan mereka untuk lebih memahami dinamika lokal dan kebutuhan spesifik petani perempuan, sehingga dapat berkontribusi pada penyuluhan yang lebih inklusif dan efektif.

3.2. Responsivitas Gender Kebijakan Penyuluhan Pertanian

Responsivitas *gender* kebijakan penyuluhan pertanian dikaji berdasarkan aspek kesesuaian materi penyuluhan, kemanfaatan materi penyuluhan, kesesuaian transportasi, ketercukupan biaya operasional, keikutsertaan diklat, keterjangkauan lokasi binaan penyuluhan, pelibatan perempuan, dan penyediaan data terpilah *gender*. Tabel 3 menyajikan perspektif *gender* dalam kebijakan penyuluhan pertanian.

Tabel 3 Perspektif *gender* dalam kebijakan penyuluhan pertanian (dalam %)

Uraian	Responden Laki-Laki				Responden Perempuan				Total			
	SS	S	KS	TS	SS	S	KS	TS	SS	S	KS	TS
1. Kesesuaian materi												
a. bagi petani laki-laki	31,7	21,7	-	-	26,7	20,0	-	-	58,3	41,7	-	-
b. bagi petani perempuan	20,0	31,7	1,7	-	25,0	18,3	3,3	-	45,0	50,0	5,0	-
c. bagi petani tidak mampu	21,7	31,7	-	-	13,7	31,7	1,7	-	35	63,3	1,7	-
2. Kemanfaatan materi												
a. bagi petani laki-laki	35,0	18,3	-	-	16,7	28,3	1,7	-	51,7	46,7	1,7	-
b. bagi petani perempuan	25,0	23,3	5,0	-	18,3	25,0	3,3	-	43,3	48,3	8,3	-
c. bagi petani tidak mampu	21,7	31,7	-	-	18,3	26,7	1,7	-	40,0	58,3	1,7	-
3. Kesesuaian sarana transportasi												
a. bagi penyuluh laki-laki	21,7	18,3	10,0	3,3	13,3	28,3	5,0	-	35	46,7	15	3,3
b. bagi penyuluh perempuan	10,0	25,0	15,0	3,3	5,0	6,7	25,0	10,0	15	31,7	40	13,3
4. Ketercukupan biaya operasional program penyuluhan												
a. bagi penyuluh laki-laki	5,0	23,3	21,7	3,3	5,0	8,3	30,0	3,3	10,0	31,7	51,7	6,7
b. bagi penyuluh perempuan	5,0	23,3	20,0	5,0	5,0	8,3	28,3	5,0	10,0	31,7	48,3	10,0

Uraian	Responden Laki-Laki				Responden Perempuan				Total			
	SS	S	KS	TS	SS	S	KS	TS	SS	S	KS	TS
5. Kemudahan mengikuti pelatihan												
a. bagi penyuluh laki-laki	15,0	36,7	1,7	-	6,7	36,7	3,3	-	21,7	73,3	5,0	-
b. bagi penyuluh perempuan	11,7	41,7	-	-	5,0	35,0	6,7	-	16,7	76,7	6,7	-
6. Kemudahan mengikuti pendidikan lanjutan												
a. bagi penyuluh laki-laki	8,3	36,7	8,3	-	-	38,3	6,7	1,7	8,3	75,0	15,0	1,7
b. bagi penyuluh perempuan	5,0	40,0	8,3	-	-	35,0	10,0	1,7	5,0	75,0	18,3	1,7
7. Keterjangkauan lokasi binaan												
a. bagi penyuluh laki-laki	5,0	33,3	15,0	-	3,3	35,0	8,3	-	8,3	68,3	23,3	-
b. bagi penyuluh perempuan	8,3	36,7	5,0	3,3	-	40,0	6,7	-	8,3	76,7	11,7	3,3
8. Adanya himbauan dari Dinas untuk melibatkan perempuan dalam kegiatan penyuluhan	-	-	43,3	10,0	-	-	40,0	6,7	-	-	83,3	16,7
9. Adanya kewajiban untuk membuat data terpilah *gender*	-	-	30,0	23,3	-	-	13,3	33,3	-	-	43,3	56,7

Keterangan: SS: Sangat Sesuai, S: Sesuai, KS: Kurang Sesuai, TS: Tidak Sesuai
Sumber: diolah dari data primer

Berdasarkan Tabel 3, terdapat kesenjangan *gender* dalam kebijakan penyuluhan pertanian untuk beberapa indikator yang dikaji. Pada indikator kesesuaian materi penyuluhan, 58,3% laki-laki merasa materi sangat sesuai, dibandingkan hanya 45% perempuan. Selain itu, 5% perempuan merasa materi kurang sesuai, sementara tidak ada laki-laki yang melaporkan hal serupa. Hal ini menunjukkan potensi bias *gender* dalam penyusunan materi yang cenderung kurang memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan, seperti teknik bertani yang efisien atau berbasis rumah tangga. Pada aspek kemanfaatan materi, laki-laki (51,7%) lebih banyak merasakan manfaat dibandingkan perempuan (43,3%). Bahkan, 8,3% perempuan melaporkan materi kurang bermanfaat, dibandingkan hanya 1,7% laki-laki, yang mengindikasikan perlunya penyesuaian materi agar lebih relevan dengan peran perempuan di sektor pertanian. Penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga yang diketuai perempuan sering kali melaporkan tingkat produktivitas yang lebih rendah dibandingkan rumah tangga yang dikepalai laki-laki, yang sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan akses perempuan terhadap input dan sumber daya pertanian (Croppenstedt *et al*., 2013; Kansiime *et al.*, 2019).

Selain itu, penerapan praktik pertanian yang ramah iklim (*climate-smart agriculture*) cenderung meningkatkan beban kerja perempuan tanpa memberikan solusi atas kebutuhan spesifik mereka (Beuchelt & Badstue, 2013; Kristjanson *et al*., 2017). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan kritis dalam desain intervensi pertanian yang sering kali gagal mempertimbangkan tantangan unik yang dihadapi perempuan. Kurangnya pendekatan responsif *gender* dalam kebijakan pertanian semakin memperburuk situasi ini, karena kebijakan cenderung mengabaikan pentingnya integrasi

perspektif perempuan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan *(*Ampaire *et al., 2020;* Paudyal *et al*., 2019). Pengarusutamaan *gender* dalam kebijakan pertanian menjadi penting untuk meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya produktif serta memperkuat partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan (Devkota *et al., 2022; Mahama et al.*, 2023).

Transportasi juga menjadi tantangan utama, di mana hanya 31,7% perempuan merasa transportasi sesuai, jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki (46,7%). Sebanyak 40% perempuan menyatakan transportasi kurang sesuai, dibandingkan 15% laki-laki. Kendala ini terkait dengan aksesibilitas, kenyamanan, atau keamanan transportasi bagi perempuan. Pada ketercukupan biaya operasional, perempuan juga menghadapi hambatan lebih besar, dengan 48,3% merasa kurang sesuai dibandingkan 51,7% laki-laki. Hambatan ini dapat disebabkan oleh alokasi anggaran yang tidak memperhitungkan kebutuhan tambahan perempuan, seperti tanggung jawab rumah tangga atau fasilitas pendukung lainnya.

Kemudahan mengikuti pelatihan dan pendidikan lanjutan menunjukkan mayoritas responden merasa cukup mudah, meskipun perempuan tetap menghadapi hambatan lebih besar. Sebanyak 76,7% perempuan merasa mudah mengikuti pelatihan dibandingkan 73,3% laki-laki. Di sisi lain, 6,7% perempuan melaporkan hambatan, dibandingkan hanya 5% laki-laki. Dalam pendidikan lanjutan, meskipun 75% perempuan dan laki-laki merasa mudah mengaksesnya, 18,3% perempuan menghadapi kendala, yang sering kali terkait dengan beban ganda atau norma sosial yang membatasi perempuan.

Keterjangkauan lokasi binaan menunjukkan hasil yang cukup baik, dengan 76,7% perempuan dan 68,3% laki-laki merasa lokasi terjangkau, namun kendala transportasi tetap memengaruhi aksesibilitas perempuan secara keseluruhan. Himbauan untuk melibatkan perempuan dalam kegiatan penyuluhan dari dinas menunjukkan hasil yang sangat rendah, di mana 83,3% responden melaporkan tidak ada himbauan semacam itu. Hal ini mengindikasikan rendahnya perhatian terhadap aspek *gender* dalam kebijakan penyuluhan. Selain itu, kewajiban untuk membuat data terpilah *gender* belum diterapkan secara maksimal, di mana hanya 43,3% responden melaporkan kewajiban tersebut diterapkan.

Berdasarkan uraian di atas tampak masih terdapat ketimpangan *gender* dalam akses dan manfaat penyuluhan, dengan laki-laki cenderung lebih diuntungkan dalam berbagai aspek. Rendahnya perhatian terhadap dimensi *gender*, baik dalam bentuk dukungan untuk lebih melibatkan perempuan dalam kegiatan penyuluhan maupun penyediaan data terpilah *gender*, menunjukkan bahwa inklusi *gender* belum menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, perlu diambil langkah strategis untuk memperkuat responsivitas *gender* dalam kebijakan penyuluhan, seperti pengembangan materi yang relevan bagi perempuan, peningkatan aksesibilitas transportasi dan lokasi, penyediaan insentif afirmatif, serta penguatan regulasi terkait pengumpulan data *gender*. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan program penyuluhan yang lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan, yang dapat memberikan manfaat setara bagi laki-laki dan perempuan di sektor pertanian.

3.3. Hasil Uji Beda Responsivitas Gender Kebijakan Penyuluhan

Hasil analisis uji beda terhadap sembilan indikator dengan uji t menggunakan *software* statistik SPSS menunjukkan beberapa temuan penting terkait persepsi penyuluh laki-laki terhadap kebijakan penyuluhan pertanian. Hasil uji beda nyata pada Tabel 4.

Tabel 4 Hasil uji beda nyata responsivitas gender kebijakan penyuluhan

Indikator	Sig.
A1. Kesesuaian materi penyuluhan secara umum bagi petani laki-laki	0.432
A2. Kesesuaian materi penyuluhan secara umum bagi petani Perempuan	0.218
A3. Kesesuaian materi penyuluhan secara umum bagi petani kurang mampu	0.112
A4. Kemanfaatan materi penyuluhan secara umum untuk petani laki-laki	0.007
A5. Kemanfaatan materi penyuluhan secara umum untuk petani Perempuan	0.370
A6. Kemanfaatan materi penyuluhan secara umum untuk petani kurang mampu	0.342
A7. Kesesuaian sarana transportasi (motor dinas) bagi penyuluh laki-laki	0.410
A8. Kesesuaian sarana transportasi (motor dinas) bagi penyuluh Perempuan	0.003
A9. Ketercukupan biaya operasional program penyuluhan bagi penyuluh laki-laki	0.115
A10. Ketercukupan biaya operasional program penyuluhan bagi penyuluh Perempuan	0.126
A11. Kemudahan mengikuti pelatihan bagi penyuluh laki-laki	0.082
A12. Kemudahan mengikuti pelatihan bagi penyuluh Perempuan	0.017
A13. Kemudahan mengikuti pendidikan lanjut bagi penyuluh laki-laki	0.058
A14. Kemudahan mengikuti pendidikan lanjut bagi penyuluh Perempuan	0.047
A15. Keterjangkauan lokasi binaan bagi penyuluh laki-laki	0.293
A16. Keterjangkauan lokasi binaan bagi penyuluh Perempuan	0.180

Berdasarkan Tabel 4, pada aspek kesesuaian dan kemanfaatan materi penyuluhan, temuan menunjukkan bahwa persepsi kesesuaian materi penyuluhan untuk petani laki-laki, perempuan, dan kurang mampu tidak memiliki perbedaan signifikan. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa program penyuluhan telah dirancang cukup inklusif dari segi konten. Namun, persepsi terhadap kemanfaatan materi menunjukkan adanya bias, di mana penyuluh laki-laki cenderung menganggap materi lebih bermanfaat untuk petani laki-laki dibandingkan kelompok lainnya ($p < 0,05$). Bias ini dapat menunjukkan bahwa materi penyuluhan kurang sensitif terhadap kebutuhan spesifik kelompok perempuan dan petani rentan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bias ini dapat mengakibatkan kurangnya sensitivitas terhadap kebutuhan spesifik kelompok perempuan dalam penyuluhan pertanian, yang pada gilirannya dapat memengaruhi efektivitas program penyuluhan tersebut (Meinzen-Dick *et al*., 2014; Ragasa, 2014).

Persepsi penyuluh laki-laki terhadap kesesuaian sarana transportasi menunjukkan perbedaan signifikan untuk penyuluh perempuan ($p = 0,003$). Hal ini mengindikasikan bahwa sarana transportasi yang ada lebih sesuai untuk penyuluh laki-laki dibandingkan perempuan, contohnya fasilitas sepeda motor. Ketidaksesuaian ini dapat disebabkan oleh desain fasilitas transportasi yang tidak mempertimbangkan kebutuhan *gender*, seperti aspek kenyamanan dan keamanan. Norma *gender* dapat memengaruhi akses perempuan terhadap layanan penyuluhan dan pelatihan, yang berpotensi memengaruhi persepsi mereka terhadap sarana transportasi yang disediakan (Mudege *et al*., 2016). Dalam konteks ini, penyuluh perempuan menghadapi tantangan tambahan dalam mengakses sarana transportasi yang sesuai, yang dapat memengaruhi efektivitas mereka dalam menjalankan tugas penyuluhan.

Hasil menunjukkan perbedaan signifikan terkait kemudahan mengikuti pelatihan ($p = 0,017$) dan pendidikan lanjut ($p = 0,047$) untuk penyuluh perempuan. Penyuluh laki-laki cenderung merasa lebih mudah mengakses pelatihan dan pendidikan lanjut dibandingkan perempuan. Hal ini disebabkan oleh kendala struktural yang dihadapi penyuluh perempuan, seperti beban kerja ganda atau kurangnya dukungan kebijakan. Ketimpangan akses terhadap pelatihan dan pendidikan lanjut dapat menghambat pengembangan kapasitas penyuluh perempuan. Ketimpangan akses ini dapat menghambat

pengembangan kapasitas penyuluh perempuan, yang berpotensi memperlebar kesenjangan *gender* dalam sektor penyuluhan. Sebagaimana diungkapkan oleh Klein *et al*. (2020), perbedaan dalam penilaian dan akses terhadap pelatihan dapat memengaruhi peluang profesional yang tersedia bagi individu berdasarkan *gender* mereka. Dalam konteks ini, penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh penyuluh perempuan, termasuk kurangnya dukungan kebijakan dan pelatihan yang sesuai, agar mereka dapat berpartisipasi secara lebih setara dalam pelatihan dan pendidikan lanjut (Okesanya *et al*., 2024).

Tidak ditemukan perbedaan signifikan dalam persepsi terkait ketercukupan anggaran operasional ($p > 0,05$). Namun, hal ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa kebutuhan semua kelompok terpenuhi. Anggaran yang tidak berbasis *gender* sering kali gagal mencerminkan kebutuhan spesifik kelompok marginal. Alokasi anggaran operasional yang seragam dapat mengabaikan kebutuhan tambahan yang mungkin diperlukan oleh penyuluh perempuan, seperti biaya transportasi atau pengasuhan anak. Audit anggaran berbasis *gender* perlu dilakukan untuk memastikan alokasi dana yang responsif terhadap kebutuhan spesifik (Hazarika dan Madhukullya, 2024).

Tidak ada perbedaan signifikan terkait keterjangkauan lokasi binaan ($p > 0,05$), menunjukkan bahwa distribusi lokasi binaan sudah cukup merata. Namun, aksesibilitas tetap perlu dievaluasi lebih lanjut, terutama untuk memastikan bahwa kelompok perempuan tidak mengalami hambatan yang tidak terlihat (*hidden barriers*). Peninjauan ulang distribusi lokasi binaan dan pengembangan infrastruktur pendukung dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyuluhan (Novitaningrum *et.al*., 2020).

4. Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan penyuluhan telah menunjukkan inklusivitas dalam beberapa aspek, namun masih terdapat bias *gender* dalam pelaksanaannya, terutama terkait penyediaan transportasi, pelatihan, dan pendidikan. Hal ini diperkuat dengan masih rendahnya dukungan untuk melibatkan perempuan dalam kegiatan penyuluhan serta penyediaan data terpilah *gender*. Kondisi ini dapat memperlebar kesenjangan *gender* dalam aksesibilitas dan efektivitas kebijakan penyuluhan yang dapat menurunkan kinerja penyuluh perempuan.

Upaya untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, perlu dilakukan langkah-langkah strategis, seperti evaluasi kebijakan berbasis *gender*, peningkatan fasilitas, dan penguatan pelatihan serta pendidikan bagi penyuluh perempuan. Selain itu, diperlukan juga pengembangan materi penyuluhan yang inklusif dengan melakukan survei kebutuhan petani, baik petani laki-laki, perempuan, maupun kelompok rentan agar lebih dipahami kebutuhan spesifik mereka terhadap materi penyuluhan. Melalui pendekatan yang berbasis *gender*, kebijakan penyuluhan dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mendukung kesetaraan *gender*, dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan kerangka kerja *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama tujuan ke-5 (kesetaraan *gender*) dan ke-10 (mengurangi kesenjangan).

5. Daftar Pustaka

Ali, H., Tolinggi, W., & Saleh, Y. (2018). Persepsi Petani terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan di Desa Talumelito Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. *Agrinesia: Jurnal Ilmiah Agribisnis*, *2*(2), 111–120. https://doi.org/https://doi.org/10.37046/agr.v2i2.2483

Ampaire, E. L., Acosta, M., Huyer, S., Kigonya, R., Muchunguzi, P., Muna, R., & Jassogne, L. (2020). *Gender* in climate change, agriculture, and natural resource policies: insights from East Africa. *Climatic Change*, *158*(1), 43–60. https://doi.org/10.1007/s10584-019-02447-0

Ardita, A., DWP, S., & Widjanarko, D. (2017). Kinerja Penyuluh Pertanian Menurut Persepsi Petani: Studi Kasus di Kabupaten Landak. *Journal of Vocational and Career Education*, *2*(1). https://doi.org/10.15294/jvce.v2i1.10908

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. (2019). *Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairan dan Kecamatan Tahun 2019*. https://bogorkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjYzIzI=/luas-lahan-sawah-menurut-jenis-pengairan-dan-kecamatan.html

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. (2023). *Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap I Kabupaten Bogor*. https://bogorkab.bps.go.id/id/publication/2023/12/15/06b0318bc50f4cf6b18a0aaa/hasil-pencacahan-lengkap-sensus-pertanian-2023---tahap-i-kabupaten-bogor.html

Beuchelt, T. D., & Badstue, L. (2013). *Gender*, nutrition- and climate-smart food production: Opportunities and trade-offs. *Food Security*, *5*(5), 709–721. https://doi.org/10.1007/s12571-013-0290-8

Blok, A. C., Alexander, C. C., Tschannen, D., & Milner, K. A. (2022). Quality improvement engagement. *Nursing Management*, *53*(3), 16–24. https://doi.org/10.1097/01.NUMA.0000821708.46746.6f

BPPSDMP Kementan. (2023). *Data Statistik SDM Penyuluhan Pertanian Tahun 2022*. https://bppsdmp-ppid.pertanian.go.id/doc/19/Buku-01 - Statistik PENYULUHAN 2022.pdf

Croppenstedt, A., Goldstein, M., & Rosas, N. (2013). *Gender and Agriculture: Inefficiencies, Segregation, and Low Productivity Traps*. The World Bank. https://doi.org/10.1596/1813-9450-6370

Devkota, R., Pant, L. P., Hambly Odame, H., Rai Paudyal, B., & Bronson, K. (2022). Rethinking *gender* mainstreaming in agricultural innovation policy in Nepal: a critical *gender* analysis. *Agriculture and Human Values*, *39*(4), 1373–1390. https://doi.org/10.1007/s10460-022-10326-1

Puspita, D. R., Rostikawati, R., & Dharma, P. (2018). *Gender* responsiveness in the counseling sessions of the Empowerment and Welfare Organization (PKK) in an attempt to increase family resilience in Cilacap Regency. Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik, 31(4), 368–379. https://doi.org/10.20473/mkp.V31I42018.368-379

Gillett-Swan, J., & Grant-Smith, D. (2020). Addressing mentor wellbeing in practicum placement mentoring relationships in initial teacher education. *International Journal of Mentoring and Coaching in Education*, *9*(4), 393–409. https://doi.org/10.1108/IJMCE-02-2020-0007

Harvey, E. B., Blakely, J. H., & Tepperman, L. (1990). Toward an index of *gender* equality. *Social Indicators Research*, *22*(3), 299–317. https://doi.org/10.1007/BF00301104

Hayati, H., Sahidu, A., Muktasam, M., Karyadi, L. W., & Suadnya, W. (2024). Penyuluhan Pertanian dan Kesetaraan *Gender* dalam Usahatani Jagung Pertanian Lahan Kering di Kecamatan Jerowaru Lombok Timur. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, *10*(2), 310–316. https://doi.org/10.29303/jseh.v10i2.598

Hazarika, A. and Madhukullya, S. (2024). Advancing *gender* equality through *gender* budgeting and auditing: a framework for *gender*-neutral budgetary allocations in india. J. Innov. Bus. Ind., 3(3), 123-130. https://doi.org/10.61552/jibi.2024.03.001

Hobson, A. J., & Mullen, C. A. (2023). *Co-Mentoring Amongst Teachers and Leaders in Transnational Schooling Contexts* (pp. 193–212). https://doi.org/10.1108/S1479-368720230000044020

Ikonny, K. A. (2017). *Kinerja Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) Laki-laki dan Perempuan dari Perspektif Petani di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur* [Universitas Brawijaya]. https://repository.ub.ac.id/id/eprint/7384/

Indraningsih, K. S. (2016). Pengaruh Penyuluhan Terhadap Keputusan Petani dalam Adopsi Inovasi Teknologi Usahatani Terpadu. *Jurnal Agro Ekonomi*, *29*(1), 1.

https://doi.org/10.21082/jae.v29n1.2011.1-24

Kansiime, M. K., Mugambi, I., Rwomushana, I., Nunda, W., Lamontagne-Godwin, J., Rware, H., Phiri, N. A., Chipabika, G., Ndlovu, M., & Day, R. (2019). Farmer perception of fall armyworm (Spodoptera frugiderda J.E. Smith) and farm-level management practices in Zambia. *Pest Management Science*, *75*(10), 2840–2850. https://doi.org/10.1002/ps.5504

Khairunnisa, N. F., Saidah, Z., Hapsari, H., & Wulandari, E. (2021). Persepsi Petani tentang Peran Penyuluh Pertanian dalam Peningkatan Pendapatan Petani Jagung Hibrida. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, *7*(1), 486. https://doi.org/10.25157/ma.v7i1.4712

Klein, R., Ufere, N. N., Rao, S. R., Koch, J., Volerman, A., Snyder, E. D., Schaeffer, S., Thompson, V., Warner, A. S., Julian, K. A., & Palamara, K. (2020). Association of *Gender* With Learner Assessment in Graduate Medical Education. *JAMA Network Open*, *3*(7), e2010888. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.10888

Krisnawati, K., Purnaningsih, N., & Asngari, P. (2013). Persepsi Petani terhadap Peranan Penyuluh Pertanian di Desa Sidomulyo dan Muari, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan. *Sosio Konsepsia*, *3*(1), 301–312. https://www.neliti.com/publications/52958/persepsi-petani-terhadap-peranan-penyuluh-pertanian-di-desa-sidomulyo-dan-muari#cite

Kristjanson, P., Bryan, E., Bernier, Q., Twyman, J., Meinzen-Dick, R., Kieran, C., Ringler, C., Jost, C., & Doss, C. (2017). Addressing *gender* in agricultural research for development in the face of a changing climate: where are we and where should we be going? *International Journal of Agricultural Sustainability*, *15*(5), 482–500. https://doi.org/10.1080/14735903.2017.1336411

Lahai, B. A. N., Goldey, P., & Jones, G. E. (1999). The *gender* of the extension agent and farmers' access to and participation in agricultural extension in Nigeria. *The Journal of Agricultural Education and Extension*, *6*(4), 223–233. https://doi.org/10.1080/13892240085300051

Mahama, H., Osei, C., Bakang, J.-E. A., & Etuah, S. (2023). An Analysis of *Gender* Mainstreaming in National Agricultural Policies and Programs in Ghana. *American Journal of Gender and Development Studies*, *2*(1), 14–24. https://doi.org/10.58425/ajgds.v2i1.193

Meinzen-Dick, R., Quisumbing, A. R., & Behrman, J. A. (2014). A System That Delivers: Integrating *Gender* into Agricultural Research, Development, and Extension. In *Gender in Agriculture* (pp. 373–391). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-017-8616-4_15

Mudege, N. N., Chevo, T., Nyekanyeka, T., Kapalasa, E., & Demo, P. (2016). *Gender* Norms and Access to Extension Services and Training among Potato Farmers in Dedza and Ntcheu in Malawi. *The Journal of Agricultural Education and Extension*, *22*(3), 291–305. https://doi.org/10.1080/1389224X.2015.1038282

Novitaningrum, R., Supardi, S., & Marwanti, S. (2020). Efisiensi teknis pengelolaan tanaman terpadu padi sawah di kabupaten karanganyar, provinsi jawa tengah. Jurnal Agro Ekonomi, 37(2), 123. https://doi.org/10.21082/jae.v37n2.2019.123-140

Okesanya, O. J., Alnaeem, K. F. H., Hassan, H. K., Oso, A. T., Adigun, O. A., Bouaddi, O., Olaleke, N. O., M kheir, S. G., Haruna, U. A., Shomuyiwa, D. O., Manirambona, E., & Asebot, M. T. (2024). The intersectional impact of climate change and *gender* inequalities in Africa. *Public Health Challenges*, *3*(1). https://doi.org/10.1002/puh2.169

Paralegal.id. (2023). *Responsif Gender*. Paralegal.Id. https://paralegal.id/pengertian/responsif-*gender*/

Paudyal, B. R., Chanana, N., Khatri-Chhetri, A., Sherpa, L., Kadariya, I., & Aggarwal, P. (2019). *Gender* Integration in Climate Change and Agricultural Policies: The Case of Nepal. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, *3*. https://doi.org/10.3389/fsufs.2019.00066

Ragasa, C. (2014). Improving *Gender* Responsiveness of Agricultural Extension. In *Gender in Agriculture* (pp. 411–430). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-

017-8616-4_17
World Bank. (2020). *World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains*. https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2020